LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN AGUSTUS DI OPD Plt. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 7 September 2026

B. Pimpinan Rakor

Plt. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Plt. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 68,07 %

b. Keuangan = 13.345.063.851 (62,96%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.020.000			8.220.000		
1	Verifikasi Manajemen Risiko (MR)/Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/FGD Urusan PPPA Dalduk KB	12.020.000	100	68,39	8.220.000	(31,61)	kegiatan menyesuaikan kebutuhan
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	53.760.000			8.538.500		
1	Rakor Data PPPA dan Dalduk KB/Rakor Data Pilah Perempuan dan Anak Jawa Tengah	53.760.000	65,19	18	8.538.500	(47,19)	rakor belum dilaksanakan menunggu pelaksanaan rakor di kementerian
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000			1.320.000		
1	Rakor Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah	9.050.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah

							ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
2	Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/Fasilitasi Rapat Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah/FGD Urusan PPPA Dalduk KB	5.950.000	52,94	22,18	1.320.000	(30,76)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.380.000			5.751.000		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.380.000	46,81	32,28	5.751.000	(14,53)	Menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	71.068.000			4.748.000		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71.068.000	9,90	8	4.748.000	(1,90)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000			27.530.000		
1	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	60.000.000	64,58	49,16	27.530.000	(15,42)	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.862.000			8.472.400		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	63,17	24	8.472.400	(39,17)	Menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000			0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000	52,65	16,66	0	(35,99)	Karena hari Jumat sebagian besar pegawai WFH maka tidak ada senam sehingga anggaran instruktur senam tidak terserap
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	11.525.000			2.750.000		
1	Peningkatan Kapasitas Tim Teknis PUG Kabupaten Kota	11.525.000	100	23,86	2.750.000	(76,14)	menunggu informasi verifikasi lapangan PPE dari KemenPPPA
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	12.400.000			0		
1	Piloting Implementasi PUG	12.400.000	50	10	0	(40)	menyesuaikan jadwal OPD terkait untuk

							pendampingan PUG
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	27.005.000			18.850.000		
1	Penyusunan RAD PUG Provinsi	27.005.000	100	73	18.850.000	(27)	draf RAD masih disusun bersama Tenaga Ahli.
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.407.500.000			763.806.000		
1	Pendidikan Politik bagi Perempuan untuk Mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender	1.407.500.000	57,22	56,51	763.806.000	(0,71)	Menyesuaikan jadwal DPRD Provinsi Jawa Tengah
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	687.938.000			318.860.570		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	294.570.000	68,65	59,89	174.998.500	(8,76)	Menyesuaikan jadwal DPRD Provinsi Jawa Tengah
2	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Perempuan	393.368.000	47,45	40,01	143.862.070	(7,44)	Adanya perubahan jadwal kegiatan menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	45.046.000			6.210.000		
1	Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten/Kota	45.046.000	23,20	18,78	6.210.000	(4,42)	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	18.650.000			2.550.000		
1	Fasilitasi Peningkatan Tim Ketahanan Keluarga Provinsi dan Kabupaten/Kota	18.650.000	67	14	2.550.000	(53)	rapat persiapan pelaksanaan TPK2D untuk kegiatan bulan September
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	15.000.000			5.960.000		
1	Evaluasi dan Verifikasi KLA di tingkat Provinsi	15.000.000	100	41,33	5.960.000	(58,67)	saat ini masih berlangsung proses evaluasi KLA oleh kementerian
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	19.220.000			12.972.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan hidup bagi AMPK	19.220.000	100	70	12.972.000	(30)	perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	8.720.000			0		
1	Pelaksanaan FGD Penguatan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan anak	8.720.000	33	0	0	(33)	pelaksanaan kegiatan di bulan Oktober. salah input target fisik di RKO
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	13.667.000			3.942.000		
1	Pelaksanaan Advokasi PANDU CINTA (Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak)	13.667.000	68,73	28,84	3.942.000	(39,89)	buku panduan kegiatan masih dalam proses
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			3.000.000		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	10.000.000	40	30	3.000.000	(10)	menyesuaikan kebutuhan korban
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000			0		
1	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban kekerasan	6.750.000	22	0	0	(22)	menyesuaikan kebutuhan korban
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			2.000.000		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan	10.000.000	40	22	2.000.000	(18)	menyesuaikan kebutuhan korban
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000			0		
1	Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Anak Korban Kekerasan	1.500.000	33	0	0	(33)	menyesuaikan kebutuhan korban

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	25	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Peningkatan Kapasitas bagi Kader BKB, BKR, BKL dalam Upaya Penurunan Angka Stunting (KS);
2. Fasilitasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas di Wonogiri (Dalduk);
3. Pilloting PUG (KG);
4. Pendampingan PUG kab / kota (KG);
5. PPEP tahap 5 (KG);
6. Sosialisasi peningkatan kesetaraan & keadilan gender - dikpol (KG);
7. Pendampingan LPLPP (KG);
8. Peningkatan kapasitas dan advokasi pembentukan Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di 5Â Â Kabupaten (Pekalongan, Pemalang, Sragentina, Wonogiri danÂ Pati) (PP);
9. Peningkatan kapasitas PPKBD (KB);
10. Safari Pelayanan KB MKJP (KB);
11. Penggerakan KB bersama mitra dalam rangka hari kontrasepsi dunia (KIE);
12. Ngopi Penak (PHA);
13. Rapat Persiapan Konferensi Forum Anak (KFA) (PHA);
14. Advokasi PANDU CINTA (PA);
15. Pelatihan manajemen kasus KtA (PA);
16. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan ABH (PA);
17. Layanan korban perempuan dan anakÂ (UPTD).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;Â
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus 2026, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 7 September 2026

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

FAJAR MUKTI SEPTYANI, S.Sos.M.Si

NIP. 197109192003122004